Analisis kebijakan Indonesia untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 melalui Perspektif Rational Actor Model

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD DAFA RAHMANOSA ARDINATA

18323154

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

Analisis kebijakan Indonesia untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia melalui 2016-2017 Melalui Perspektif Model Aktor Rasional

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

MUHAMMAD DAFA RAHMANOSA ARDINATA

18323154

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis kebijakan Indonesia untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 melalui Perspektif Rational Actor Model

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
12 Desember 2022

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, Ph.D	
2. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
3. Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Muhammad Dafa Rahmanosa Ardinata
No. Mahasiswa	: 18323154
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Analisis kebijakan Indonesia untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 melalui Perspektif Rational Actor Model

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Dalam penelitian skripsi ini, saya tidak melakukan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti plagiasi, hasil tangan orang lain, serta pelanggaran lainnya yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Saya bersedia menerima sanksi apabila ditemukannya kecurangan atau kesalahan akademik sesuai dengan aturan Universitas Islam Indonesia
3. Apabila di kemudian waktu setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti yang secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah plagiarisasi, maka saya bersedia menerima konsekuensi akademik yang ditetapkan.

Yogyakarta, 29 November 2022



Muhammad Dafa Rahmanosa Ardinata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR, DAN FIGUR vii

DAFTAR SINGKATAN viii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Cakupan penelitian 6

1.5 Tinjauan Pustaka 7

1.6 Kerangka Pemikiran 10

Tabel 1. Tabel *Rational Actor Model* 12

1.7 Argumen Sementara 12

1.8 Metode Penelitian 13

1.8.1 Jenis Penelitian 13

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 13

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 13

1.8.4 Proses Penelitian 13

1.9 Sistematika Pembahasan 14

BAB 2 SEJARAH DAN DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA 16

2.1 Sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Australia 18

2.2 Dampak normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia terhadap kerjasama militer 25

BAB 3 KEBIJAKAN UNTUK MENORMALISASI KEMBALI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PASCA MEMBURUKNYA HUBUNGAN KEDUA NEGARA 28

3.1 Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Militer Indonesia Australia Melalui Parameter *Goals and Objectives* 31

3.2 Parameter *Alternatives* dalam Normalisasi Kerjasama Militer Indonesia dan Australia 36

3.3 Konsekuensi Kebijakan Indonesia untuk Melakukan Normalisasi 41

3.4 Pilihan Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Normalisasi Kerjasama Militer Indonesia dan Australia 45

Tabel 2. Hasil dari Parameter *Rational Actor Model* 49

BAB 4 PENUTUP 51

4.1 Kesimpulan 51

4.2 Rekomendasi 52

DAFTAR PUSTAKA 54

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, DAN FIGUR

Tabel 1. Parameter *Rational Actor Model* ……12

Tabel 2. Hasil dari Parameter *Rational Actor Model* ……49

DAFTAR SINGKATAN

ABC : *Australian Broadcasting Corporation*

AD : Angkatan Darat

ADF : *Australia Defence Forces*

APD : Alat Pelindung Diri

APRS : *Asia Pacific Rainforest Summit*

ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

FDI : *Foreign District Investment*

FPDA : *Five Power Defence Arrangement*

GFP : *Global Fire Power*

HAKI : Hak Atas Kekayaan dan Intelektual

IA-CEPA : *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*

IGGI : *Interngovernmental Group of Indonesia*

JOCIT : *Junior Officer Combat Instructor Training*

Kopassus : Komando Pasukan Khusus

KJRI : Konsulat Jenderal Republik Indonesia

KRI : Kapal Perang Republik Indonesia

OEM : Original Equipment Manufacturer

PDN : Pinjaman Dalam Negeri

PLN : Pinjaman Luar Negeri

PM : Perdana Menteri

PMD : Poros Maritim Dunia

PMV : *Protected Mobility Vehicle*

SAS : *Special Air Service Regiment*

TNI : Tentara Negara Indonesia

USD : *United States Dollar*

ABSTRAK

Pada tahun 2016, Indonesia dan Australia melakukan sebuah latihan militer bersama di Perth, Australia. Semasa pelatihan militer tersebut, instruktur bahasa dari Kopassus menemukan sebuah materi yang isinya melecehkan Pancasila dan TNI. Dalam penelitian ini pendekatan teori yang digunakan adalah Model Aktor Rasional. Kemudian teori ini memiliki 4 parameter, diantaranya berdasarkan *tujuan dan sasaran*, kebijakan *alternatif*, memperhatikan *konsekuensi*, dan *pilihan* yang diambil. Penelitian ini peneliti meletakkan argumen sementara, bahwa kerjasama antara Indonesia dan Australia tidak memperoleh hambatan karena adanya peristiwa yang telah terjadi. Meskipun hal ini telah memberikan luka bagi negara Indonesia, karena hal ini menyangkut pautkan lambang negara dan garda terdepan terhadap pertahanan negara. Namun tetap saja kedua negara ini memiliki sinergi yang sangat baik untuk saling melangkah kedepan. Hasil penelitian yang didapatkan adalah kedua negara telah melakukan berbagai kebijakan dengan baik dan membangun hubungan yang saling memberikan value. Indonesia dan Australia tak hanya menjalankan kerjasama militer dengan baik pasca permasalahan ini, namun di antaranya ada kerjasama perdagangan.

Kata kunci: Indonesia, Australia, Militer, Kerjasama, Model Aktor Rasional.

ABSTRACT

In 2016, Indonesia and Australia conducted joint military exercises in Perth, Australia. During military training, a language instructor from Kopassus found material that insulted Pancasila and the TNI. In this study, the theoretical approach used is the Rational Actor Model. Then this theory has four parameters, including based on goals and objectives, policy alternatives, paying attention to consequences, and choices made. In this study, the researcher put forward a temporary argument, that the cooperation between Indonesia and Australia did not encounter obstacles because of the events that had occurred. Although this is detrimental to the Indonesian state, because it involves the linkage of the state symbol and the front line of national defense. However, these two countries have very good synergies to advance each other. The results of the research are that the two countries have implemented various policies well and built relationships that provide mutual value. Indonesia and Australia have not only carried out military cooperation well after this issue, but one of them is trade cooperation.

Keywords: *Indonesia, Australia, Military, Cooperation, Rational Actor Model.*

PENDAHULUAN (BAB 1)

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Hubungan Internasional, suatu pihak dan pihak lain itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Demi melengkapi kebutuhan dan kekurangan mereka sebaiknya saling berinteraksi dan berkontribusi dengan pihak lain. Sehingga dengan dilakukannya hal tersebut dapat menimbulkan hubungan yang harmonis. Begitu juga dengan negara, disaat suatu negara membutuhkan suatu hal, maka kepentingan tersebut disampaikan dengan negara lain yang memiliki kebutuhan tersebut. Singkatnya hal ini disebut kerjasama, kerjasama adalah hal yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dengan lainnya untuk mencapai kebutuhan dan keinginan bersama. Namun hal ini tentunya memiliki persyaratan dan ketentuan yang harus ditaati dan dihormati, dengan demikian suatu kerjasama pun dapat berdiri dengan baik dan tidak terjadi permasalahan dan saling berselisih paham. Seperti hal nya Indonesia dan Australia yang telah melakukan kerjasama bilateral. Dua negara ini memiliki jarak yang sangat dekat, dengan dekatnya jarak dua negara tersebut membuat Indonesia dan Australia lebih mudah untuk mengakses kebutuhan dan keperluan. Salah satu kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Australia, yaitu kerjasama dalam sektor militer, seperti kerjasama dalam bentuk pelatihan militer Indonesia dan Australia. Akan tetapi, kerjasama tersebut terus terjalin dalam berbagai sektor, seperti ekonomi.

Secara geografis, Australia dan Indonesia akan selalu menjadi negara tetangga di titik tumpu pada maritim Indo-Pasifik. Namun hal tersebut tidak secara otomatis

menjamin bahwa Indonesia dan Australia akan menjadi teman dekat atau akan saling memahami dengan baik dan saling mendukung. Di mana kedua negara ini memiliki kepentingan yang cukup tumpang tindih. Indonesia dan Australia harus mencari cara untuk memperdalam dan memperluas hubungan bilateral agar siklus ini tidak terus berulang. Hal tersebut membutuhkan kebijakan yang disepakati oleh kedua negara. Seperti saudara kandung, kedua negara ini telah belajar untuk akur. Namun ada begitu lebih jauh potensial dalam hubungan daripada yang telah direalisasikan sejauh ini (Blaxland, 2021).

Dari tahun 1995 Indonesia dan Australia saling menjalin hubungan kerjasama untuk meningkatkan pertahan dan ketahanan di bidang militer. Sehingga dua negara tersebut pun saling melakukan pertukaran informasi dan intelijen, operasi militer terhadap penyelundupan manusia, latihan bersama antara militer Indonesia dan Australia, melakukan perjanjian kontra-terorisme dan melakukan patrol di kawasan laut Selatan Jawa. Selama masa berjalannya kerjasama ini juga seringkali didapati berbagai permasalahan, yang mana membuat hubungan kerjasama militer Indonesia dan Australia mengalami pasang surut. Seperti contohnya militer Australia mendapat tuduhan telah melakukan penyadapan terhadap Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan sejumlah pejabat tinggi di Indonesia, bahkan Indonesia yang menolak keinginan Australia untuk mengirim dan menempatkan pasukan militernya di Indonesia, hal ini dikarenakan kehadiran aparat yang datang dari Australia dinilai sebagai sikap intervensi yang dimunculkan oleh Australia (KOMPASTV, 2017). Dengan apa yang terjadi, seringkali menimbulkan polemik dan

juga perdebatan, sehingga menurut penulis hal ini mempengaruhi kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia, terutama dalam sektor militer antara kedua negara.

Pada tahun 2017 Indonesia menghentikan sementara hubungan kerjasama militer dengan Australia. Hal itu terjadi saat tentara Indonesia mendapatkan pelatihan militer di Perth, Australia. Tentara Indonesia mengatakan bahwa didapatinya dari militer Australia selama masa pelatihan militer berupa materi terhadap penghinaan terhadap Pancasila dan juga Tentara Negara Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Indonesia. Selanjutnya dari apa yang didapati oleh tentara Indonesia ini pun di usut dan dibahas bersama Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Akhirnya Jenderal Gatot Nurmantyo memutuskan untuk menghentikan kerjasama bilateral dalam sektor militer sementara dengan Australia. Dalam wawancaranya, Jenderal Gatot Nurmantyo mengkonfirmasi bahwa terdapat kurikulum pengajaran pendidikan militer di Australia menyinggung tentara Indonesia dan ideologi negara Indonesia yaitu pancasila. Dengan apa yang telah terjadi membuat Jendral Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa beliau tidak ingin pergi ke Australia, dan beliau juga menegaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak bersalah dalam hal ini (kumparan, 2017). Selanjutnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia berjalan dengan baik, Joko Widodo pun menginginkan agar Panglima TNI dan menteri pertahanan segara memulihkan kembali kondisi antara militer Indonesia dan Australia agar tidak semakin memburuk (CNN Indonesia, 2017).

Bahkan, sebelum hubungan militer kedua negara antara Indonesia dan Australia telah resmi dipulihkan, panglima militer Australia juga telah bertemu

dengan para Jenderal TNI di Jakarta, Indonesia. Hal ini diperuntukkan dalam memberikan permintaan maaf terhadap Indonesia. Kemudian, panglima TNI Indonesia juga telah menerima permintaan maaf tersebut dari Australia. Sebelum adanya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Australia, Indonesia juga telah membekukan seluruh kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Australia, pasca penistaan terhadap TNI dan Pancasila tersebut.

Begitu juga dengan pemerintah Australia yang berupaya untuk mendekati pemerintah Indonesia, seperti yang dikatakan menteri pertahanan Australia Marise Payne bahwa panglima tentara Australia memiliki hubungan yang baik dengan menteri koordinator politik hukum dan keamanan Indonesia Wiranto (KOMPASTV, 2017), Marise Payne juga meminta maaf dengan apa yang terjadi terhadap Indonesia dan menghapus materi pelatihan yang telah dianggap menghina dan melecehkan Pancasila dan tentara Indonesia (CNN Indonesia, 2017). Sehingga dengan apa yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat memulihkan kembali hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia. Saat ini hubungan militer antara Indonesia dan Australia telah dipulihkan kembali. Pemulihan kembali hubungan Indonesia dan Australia dalam sektor militer dimulai dengan Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi datang ke Australia menghampiri Perdana Menteri Malcolm Turnbull, sesampainya Presiden Jokowi di sana Perdana Menteri menyatakan permintaan damai dengan Presiden Jokowi terhadap apa yang telah terjadi. Panglima militer Australia Angus Campbell menghampiri Panglima TNI Gatot Nurmantyo untuk menyampaikan permohonan maaf terkait insiden yang telah terjadi. Panglima TNI Gatot Nurmantyo menerima permintaan maaf Panglima militer Australia Angus Campbell tersebut

(BBC News, 2017). Namun hal tersebut tetap dan masih saja belum memulihkan total hubungan antara Indonesia dan Australia di bidang militer secara total, karena menurut peneliti dengan apa yang dilakukan oleh Australia telah menyangkut ideologi dan martabat negara Indonesia, meskipun secara resmi Australia telah mengucapkan permohonan maaf. Mestinya hal tersebut harus melalui proses-proses yang lebih mendalam agar hubungan dua negara tersebut dapat cepat kembali membaik dan pertahan militer antara Indonesia dan Australia dapat berdiri kokoh lagi.

Maka, penelitian ini akan menganalisis mengenai normalisasi yang dilakukan oleh kedua negara, yaitu Indonesia dan Australia dalam hubungan bilateral kedua negara pasca terjadinya penistaan terhadap Pancasila dan TNI AD, yang terjadi di Australia. Sehingga, peneliti juga akan melihat kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam melakukan normalisasi kembali hubungan bilateral Indonesia dan Australia pasca penistaan Pancasila dan TNI AD.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kebijakan Indonesia untuk menormalisasi kembali kerjasama militer Indonesia-Australia pasca memburuknya hubungan pada tahun 2016-2021 melalui perspektif Model Aktor Rasional?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki tujuan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana kebijakan negara Indonesia untuk melakukan normalisasi dalam kerjasama militernya dengan Australia pasca penistaan TNI dan Pancasila. Yang mana hal ini terjadi pada saat tentara Indonesia melakukan pelatihan di Australia pada tahun 2016. Mengetahui hal tersebut membuat Indonesia untuk menghentikan kerjasamanya di bidang militer dengan Australia. Kemudian di tahun 2017 kembali menormalisasikan hubungan militer dengan Australia.

1.4 CAKUPAN PENELITIAN

Fokus dari penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah untuk mengetahui alasan yang membuat negara Indonesia membuka kembali kerjasama di bidang militernya dengan negara Australia. Penelitian ini dimulai dari tahun 2017, yang bermula ketika Presiden Jokowi pergi ke Australia untuk menghampiri PM Turnbull untuk membahas seputar hubungan bilateral antara Indonesia-Australia agar dapat dipulihkan dalam bidang militer. Kemudian penelitian ini akan dibatasi hingga 2021 sebagaimana prospek hubungan bilateral tersebut pasca penistaan Pancasila dan TNI, apakah hubungan tersebut kian membaik atau memburuk dengan peristiwa yang telah berlalu tersebut.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang kredibel, yaitu:

Hervan Dwison pada tahun 2017, dalam tulisannya yang berjudul "Status Hubungan Bilateral Antara Indonesia-Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila Oleh Militer Australia Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional". Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Hervan Dwison menunjukkan rumusan masalah mengenai masalah apa saja yang melatarbelakangi sengketa antara militer Indonesia dan Australia, dan bagaimana peran perjanjian bilateral dapat meleraikan perselisihan dua negara tersebut dalam perjanjian bilateralnya. Penelitian yang dilakukan oleh Hervan menunjukkan bahwa perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami berbagai perkara pasang surut, dengan adanya konteks tersebut membuat dua negara tersebut tak dapat terpecahkan dalam berhubungan meskipun militer Australia melakukan hal yang kurang mengenakkan kepada militer Indonesia (Dwison, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Dwison sebelumnya belum pernah membahas dari sudut pandang yang dilakukan oleh peneliti, mak dari itu peneliti akan membahasnya dari sudut pandang Model Aktor Rasional.

Kemudian karya Rd. Dessy Noer P. yang berjudul tentang "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Kasus Penyadapan Pada Era Pemerintahan SBY dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Militer Indonesia-Australia", penelitian ini diterbitkan pada tahun 2017. Dari tulisan yang dirancang oleh penulis tersebut membahas tentang bagaimana prospek kerjasama hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam kerjasama keamanan usai penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia. Tulisan yang dibuat Dessy menceritakan bagaimana perjalan

hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dari masa presiden Ir. Soekarno sampai dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Beliau menemukan bahwa diketahuinya pihak dari Australia yang melakukan penyadapan terhadap presiden Indonesia yang ke-6, hal tersebut membuat kondisi hubungan antara Indonesia dengan Australia mengalami permasalahan (Dessy, 2017). Dari sudut pandang yang dilakukan Dessy sebelumnya tidak membahas hal yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu peneliti akan mengangkat penelitian ini menggunakan Model Aktor Rasional.

Kemudian jurnal dari Siti Muti'ah Setyawati dan Dafri Agussalim menulis sebuah jurnal yang berjudul "Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara", dan jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015. Dalam penulisannya jurnal ini membahas tentang karakter antara Indonesia dan Australia dalam memahami konteks keamanan dalam pola *kerjasama* dan *permusuhan.* Jurnal ini lebih menekankan bahwa pentingnya untuk mengambil keputusan untuk memperoleh suatu kebijakan baik Indonesia maupun Australia, dan yang lebih penting lagi adalah untuk memperhatikan langkah dalam berdiplomasi di segi perpolitikan luar negeri (Setyawati & Agussalim, 2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh mereka tidak membahas hal ini dari sudut pandang Model Aktor Rasional, maka dari itu peneliti akan membahas penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

Kemudian terdapat jurnal dari Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si yang berjudul "Eksistensi TNI dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Non-Militer Multidimensional di Era Milenial" yang diterbitkan pada tahun 2019. Tulisan ini

memuat bagaimana militer Indonesia berdiri pada era milenial saat ini, yang mana dalam tulisannya mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadi sasaran yang dapat dimanfaatkan bagi negara-negara luar. Transformasi dari globalisasi yang terjadi di Indonesia membuat militer Indonesia mesti untuk tetap terjaga. Oleh maka dari itu militer di Indonesia melihat bahwasannya kemajuan teknologi, berkembangnya informasi dan komunikasi membuat militer Indonesia merasa kini konsep peperangan telah semakin luas. Sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi bagaimana militer Indonesia dalam menghadapi politik luar negeri (Prof. Dr. Armaidy Armawi, 2019). Dari penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Armaidy membahas bagaimana kebijakan dalam perkembangan militernya, sehingga penelitian ini belum membahas seperti yang dilakukan oleh peneliti.

Kemudian adalah jurnal dari Yeni Wijayanti, beliau menulis sebuah jurnal yang berjudul "Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995", jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 2019. Dalam tulisannya Yeni membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan hubungan bilateral antara negara Indonesia dengan Australia mengalami fluktuasi atau pasang surut. Yeni juga menjelaskan bahwa terdapatnya kekhawatiran dari suatu ancaman keamanan antara dua negara tersebut, serat dari sektor ekonomi Indonesia dan Australia juga memperdebatkan soal ini (Wijayanti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti membahas bagaimana berjalannya dinamika hubungan bilateral kedua negara, sehingga penelitian ini belum membahas bagaimana mekanisme penelitiannya dari sudut pandang menghadapi permasalahan dari metode Model Aktor Rasional..

Terakhir jurnal dari Richard Herrmann yang berjudul "*The Power of Perceptions in Foreign-Policy Decision Making: Do Views of the Soviet Union Determine the Policy Choices of American Leaders*?". Dalam tulisan yang disusun oleh Richard Herrmann, beliau menulis bahwa persepsi merupakan variabel yang penting dalam kebijakan politik luar negeri. Richard Herrmann mengatakan bahwa persepsi merupakan sebuah ide utama untuk membangun basis kognitif dalam pembuatan suatu kebijakan (Herrmann, 2015). Maka dari itu penelitian yang dilakukan oleh Herrmann belum membahas bagaimana sudut pandang Model Aktor Rasional menjadi bagian dari penelitian yang dilakukan olehnya. dalam suatu kebijakan dapat dirasakan bahwa persepsi itu memiliki makna yang berarti untuk kelancaran politik luar negeri, baik itu untuk pihak tertentu, aktor negara dan juga aktor non-negara.

1.6 KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian yang dibuat oleh penulis ini menggunakan landasan teori untuk memperjelas isu yang dibahas. Pada 2016, TNI menemukan materi penistaan Pancasila dan TNI. Penistaan tersebut ditemukan pada pelatihan militer bersama di Perth, Australia. Meskipun pelatihan bersama ini memperkuat pertahanan dan membentuk hubungan diplomasi yang lebih baik, namun hal ini justru menimbulkan permasalahan bagi Indonesia dan Australia.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Rational Actor Model oleh Graham T. Allison sebagai kerangka pemikiran, dalam karya yang Allison susun adalah 4 parameter dari model aktor rasional yaitu "*Goals and Objectives,*

Alternatives, Consequences, Choices" (Allison 1971). Menurut Allison 4 parameter ini merupakan suatu takaran bagi sang pembuat kebijakan untuk menghadapi kebijakan yang mereka jalankan. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa aktor perlu aware terhadap posisi untuk memperoleh keputusan rasional, maka dari itu bagaimanapun kondisi suatu negara dalam menjalankan suatu hubungan dengan negara lain sangat diperlukan untuk tetap menjaga kekuatannya. Namun, negara sudah seharusnya mempertahankan sistem diplomasinya, yaitu mempertimbangkan pilihan untuk mengetahui batas agar dapat bertahan pada sebuah konsekuensi serta fokus pada tujuan dan keuntungan (White and Clarke 1989).

Suatu negara perlu mempertimbangkan sistem anarki untuk suatu keputusan. Kebijakan dari model ini membuat negara menemukan jalur tengah dalam hubungan kerjasama, karena keputusan suatu negara dapat melancarkan upaya untuk mencari jalan tengah bagi kedua negara. Namun model ini juga memiliki kekurangan yaitu mengabaikan emosional negara karena keputusan politik maupun non politik, serta kelancaran birokrasi dan pemikiran suatu kelompok (Latifa, 2010).

Tahun 2017 Indonesia membuka kembali kerjasama militer dengan Australia. Presiden Jokowi membuat keputusan untuk melanjutkan kerjasama pasca penistaan Pancasila dan TNI. Namun, hal ini sangat mengusik harga diri dan martabat Indonesia. Namun, Indonesia tetap harus menjalin hubungan dengan Australia berdasarkan beberapa tujuan tertentu.

Konflik tersebut membuat militer Indonesia harus menghentikan kerjasama dalam bidang militer untuk sementara waktu. Menteri pertahanan Australia, Marise Payne juga menyampaikan klarifikasi mengenai materi dalam pelatihan militer.

Upaya yang dilakukan oleh menteri pertahanan untuk memperbaiki hubungan antara militer Indonesia dengan militer Australia. Presiden Jokowi juga mengatakan ingin menyelesaikan sengketa antara militer Indonesia dengan Australia. Presiden Jokowi pergi ke Australia untuk menyelesaikan isu militer dan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Kedua kepala pemerintahan menyatakan perdamaian atas konflik tersebut (DW, 2017).

Tabel 1. Parameter *Rational Actor Model*

	Parameter	Karakteristik
RATIONAL ACTOR MODEL	*Goals and Objectives*	target, tujuan, langkah
	Alternatives	opsi, langkah preventif, titik balik
	Consequences	dampak dan akibat, kelebihan dan kekurangan
	Choices	upaya, pilihan, akurasi

Sumber*: Esssence of Decision: Explaining the Cuban missile Crisis Book (1971)*

1.7 ARGUMEN SEMENTARA

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan argumen sementara yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil menormalisasikan kembali hubungan Indonesia dan Australia dalam bidang militer. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang memiliki jarak geografis yang berdekatan, hal ini diperlihatkan melalui lahirnya kerjasama dalam perekonomian seperti perdagangan,

ekspor dan impor yang telah dilakukan. Melihat kembali masa lalu kerjasama kedua negara ini yang sering mengalami peristiwa baik dan buruk memberikan berbagai sudut pandang terhadap publik. Cara Australia yang melecehkan negara Indonesia tentunya telah melukai bangsa Indonesia, dengan segala kemungkinan yang ada pemerintah Indonesia mampu menggerakkan roda kerjasama agar dapat dikendalikan. Berbagai upaya dan rasionalitas tidak membuat peristiwa yang terjadi menjadi halangan bagi kedua negara tersebut. Karena kedua negara itu memiliki sinergi yang sangat baik untuk melangkah kedepan bersama.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang dirancang ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti akan menggunakan data-data yang diperlukan untuk meneliti terkait rumusan masalah. Dalam penelitian ini tidak menutup kemungkinan bahwa tentunya juga menyajikan data berupa tabel, namun hal tersebut masih bersifat deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti subjek yang digunakan oleh peneliti adalah negara Indonesia dan Australia, kedua negara ini menjadi subjek karena tengah menjadi pembahasan yang memiliki permasalahan. Kemudian Objek dalam penelitian ini adalah proses kebijakan normalisasi dalam hubungan bilateral pasca penistaan Pancasila dan TNI saat latihan militer bersama di Perth, Australia pada 2016.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan studi dokumen. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari dokumen sekunder yang telah ditelusuri melalui penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti-peneliti lain. Buku, jurnal, media berita merupakan tumpuan untuk menyusun penelitian ini.

1.8.4 Proses Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, cara yang dilakukan adalah memperoleh berbagai dokumen yang berkaitan untuk membangun penelitian ini. Seperti mencari latar belakang masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah adalah hal yang digunakan untuk menjawab dan menentukan dari sebuah tujuan yang akan diteliti.

1.9 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembuatan sistematika pembahasan, peneliti akan memberikan 4 bagian yang menjadi isi dari skripsi ini.

1.9.1 Bab I memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

1.9.2 Bab II akan menjelaskan mengenai kebijakan dinamika hubungan antara Indonesia dengan Australia sebelum terjadinya peristiwa penistaan terhadap Pancasila dan TNI, dan kebijakan pertahanan, serta militer yang telah dijalankan oleh kedua negara.

1.9.3 Bab III memuat mengenai rumusan masalah. Dengan rumusan masalah mengenai “bagaimana kebijakan Indonesia untuk menormalisasi kembali kerjasama militer Indonesia-Australia pasca memburuknya hubungan pada tahun 2016-2021 melalui perspektif Model Aktor Rasional?”

1.9.4 Bab IV menjadi bagian akhir yang dijadikan sebagai penutup dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal tersebut berisikan kesimpulan dan rekomendasi terkait penelitian ini.

BAB 2

SEJARAH DAN DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DAN AUSTRALIA

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan dalam bab 1, penulis telaah menganalisa bahwasannya negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari negara Australia di bidang militer. Pancasila dan TNI telah dilecehkan oleh militer Australia dalam materi yang diberikan kepada militer Indonesia. Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan penolakannya untuk pergi ke Australia telah digantikan oleh Presiden Jokowi, beliau menghampiri Perdana Menteri Malcolm Turnbull untuk saling menyampaikan pernyataan damai terkait permasalahan yang ada. Setelah semua itu, Australia mengatakan pernyataan bahwa mereka menyesal telah melakukan penistaan terhadap Indonesia. Dari saat itu Australia berupaya untuk mengusut permasalahan tersebut yang menyebabkan konflik (berisatu.com 2017).

Dalam hal ini, terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa, materi pelatihan yang diberikan oleh Australia berisikan mengenai penistaan terhadap militer Indonesia. Dalam isi materi tersebut terdapat beberapa pernyataan yang membahas mengenai masa lalu negara Indonesia, yaitu Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan mantan pemimpin militer Indonesia, dikatakan mendiang merupakan seorang pembunuh massal. Kemudian militer Indonesia menemukan kalimat yang mengatakan seorang perwira Indonesia adalah seorang pembunuh, sehigga beliau menghabisi temannya sambil mabuk. Selanjutnya ditemukannya pula oleh militer

Indonesia bahwasannya pada dinding pangkalan militer Australia, kalimat Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA atau “Lima Prinsip Gila” (Tempo.co 2017). Dengan demikian hal ini memberikan fakta kepada khalayak umum, bahwasannya militer Australia memberikan pelayanan yang kurang baik kepada militer Indonesia.

Di negara Indonesia timbul polemik dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari mendukung adanya pemberhentian kerjasama di bidang militer antara Indonesia dan Australia. Beliau berkata sekiranya ditemukan penghinaan terhadap Pancasila dan TNI dalam materi yang diberikan oleh militer Australia, beliau mengapresiasi kebijakan akan pemberhentian tersebut. Abdul Kharis Almasyhari menegaskan bahwa hal ini juga bertujuan untuk negara Australia agar menghargai dan menghormati kedaulatan antara negara. Dari hasil yang diperoleh oleh rapat anggota DPR menyampaikan bentuk pelecehan tersebut telah dikonfirmasi, anggota DPR menyebarluaskan ke seluruh masyarakat negara Indonesia mengenai hal ini. Namun hal tersebut tetap membuat negara Indonesia dan Australia untuk melanjutkan hubungan kerjasama di bidang militer (Sihaloho 2017).

Sehingga peneliti akan mengkaji bagaimana sejarah hubungan bilateral yang terjadi antara Indonesia dan Australia, serta mengamati bagaimana dampak normalisasi hubungan kedua negara terhadap kerjasama dibidang militer.

2.1. Sejarah hubungan bilateral Indonesia dan Australia

Indonesia dan Australia adalah negara yang memiliki jarak berdekatan secara geografis. Australia sendiri sudah membantu dan menolong negara Indonesia sejak era pencapaian kedaulatan pada tahun 1945. Tindakan Australia juga tidak dilakukan oleh pemerintahannya saja, namun masyarakat Australia juga turun tangan untuk membantu negara Indonesia seperti halnya masyarakat Australia memboikot 559 kapal dagang dan perang yang berupaya untuk membangun kolonialisme Belanda kembali di Indonesia.

Berbagai upaya dan tindakan yang dilakukan oleh Australia merupakan salah satu bentuk dukungan moral terhadap negara Indonesia. Australia adalah negara yang mengakui Indonesia secara *de facto* pada Juli 1947 dan *de Jure* pada Desember 1949. Australia juga menjadi negara yang mendukung Indonesia ketika akan masuk menjadi anggota PBB di tahun 1950. Kemudian hubungan baik tersebut tidak berlangsung begitu lama, bermulai dari tahun 1950, Australia mulai menentang berbagai kebijakan negara Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang ingin mengambil alih kembali Irian Barat (1957-1963) serta konfrontasi dengan negara Malaysia (1963-1966). Selanjutnya pasca pergantian pemerintahan yang baru dari Australia, hal tersebut menimbulkan perbedaan ideologi yang ditimbulkan antara koalisi partai buruh dan *liberal country*. Maka dari itu menyebabkan pola pikir dan pandangan Australia juga berubah terhadap Indonesia di tahun 1950-an hingga 1960-an.

Kemudian Australia juga khawatir dengan Indonesia sebagai negara baru merdeka, yang berusaha untuk menanggung upaya dalam mempertahankan wilayah

yang mengalami keterlambatan seperti Irian Barat, serta hal lainnya Australia juga tidak menginginkan adanya tanda-tanda kemunculan Komunisme. Kemudian pada tahun 1967 hubungan antara kedua negara tersebut mulai membaik ketika pemerintahan Indonesia mulai dipimpin oleh Soeharto pasca kepemimpinan Soekarno. Masa-masa kepemimpinan Soeharto membuat hubungan antara Indonesia dan Australia menjadi lebih kondusif, yang mana beliau Anti-Komunis dan menerapkan politik yang bebas aktif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh kedua negara tersebut agar menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif di antaranya:

1. Pada tahun 1967 program konsorsium *Intern Governmental Group of Indonesia* (IGGI) untuk pembangunan negara Indonesia.
2. Pada tahun 1968 kedua negara tersebut melakukan Cultural Agreement, yaitu mengenai pertukaran perkembangan pendidikan dan budaya antar negara.
3. Pada tahun 1970 kedua pemimpin negara tersebut saling melakukan pertemuan balasan.

Meski sudah melakukan berbagai kerjasama dari pernyataan di atas, namun kedua negara tersebut mulai mengalami kesurutan kembali dalam hubungannya. Dikala Indonesia melakukan intervensi di Timor Timur pada tahun 1975, terdapat lima wartawan Australia yang tengah bertugas di Timor Timur tewas dalam peperangan Balibo. Hal ini membuat Australia kesal dengan dengan melakukan sanksi ke Indonesia yang mana Indonesia tak dapat memperoleh perpanjangan terkait izin dari dua koresponden *Australian Broadcasting Corporation* (ABC) Warwick Butler dan Joe Command an segera diakhiri pada 1980. Padahal negara Indonesia telah memperoleh kerjasama terkait peliputan di Australia selama 20 tahun lamanya.

Bob Hawke membawa perdamaian antara Indonesia dan Australia kembali pada 1983, beliau berhasil menyaingi Malcolm Fraser dari partai Koalisi Liberal-Nasional serta membangun hubungan Jakarta dan Canberra. Tak lama kemudian David Jenkins menuliskan sebuah artikel yang menyinggung terkait Soeharto yang membuat hubungan Indonesia dan Australia retak kembali lagi. Setelah itu membuat kedua negara tersebut saling melakukan tindak lempar batu atau membuat kebijakan larangan negara satu sama lain, termasuk hubungan kerjasama dibidang militer. Hubungan antara Indonesia dan Australia yang disebabkan oleh David Jenkins telah terhambat selama dua tahun lamanya, kemudian mencair kembali pada 1988. Pasca permasalahan yang ditimbulkan oleh David Jenkins, Kim Beazley selaku Menteri Pertahanan Australia pada saat itu menginginkan agar Indonesia dapat mau kembali bekerjasama dengan Australia pada 23 Februari 1988.

Masuk ke tahun 2016 Indonesia memperoleh perlakuan yang kurang baik oleh militer Australia. Yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang melakukan pelatihan bersama dengan angkatan militer Australia. Instruktur bahasa Kopassus dalam masa pelatihan bersama menemukan sebuah materi yang isinya melecehkan Pancasila dan TNI. Maka dari itu TNI secara spontan menunjukkan reaksi yang ingin menghentikan hubungan kerjasama bilateral dalam bidang militer (Widiastuti, 2017).

Pada tahun 2017 hubungan antara Indonesia dan Australia kian membaik kembali, yakni pemulihan hubungan kerjasama militer. Presiden Jokowi pergi ke Australia untuk menjumpai perdana menteri Malcolm Turnbull. Turnbull mengatakan bahwasannya beliau sepakat dan ingin memulihkan hubungan kerjasama militer antara Indonesia dan Australia. Presiden Jokowi ingin rintangan perdagangan seperti

tarif maupun non-tarif agar dapat dicabut, halnya seperti berbagai barang-barang produksi Indonesia seperti minyak sawit dan kertas. Angus Campbell pun terbang ke Jakarta pada tahun yang sama untuk menjumpai Jenderal TNI untuk menyampaikan permohonan maaf serta klasifikasinya, Gatot Nurmantyo pun menghargai kehadiran beliau dan menerima permohonan maafnya tersebut (BBC 2017).

Sederhananya mengapa kedua negara ini sering mengalami pasang surut dalam hubungan bilateral? Hal tersebut didasari karena dua negara ini memiliki jarak geografis yang berdekatan, kemudian adanya perbedaan terkait kebijakan politik, kebijakan luar negeri, strata ekonomi dan persepsi. Maka dari itu, berbagai polemik yang muncul menimbulkan berbagai pertimbangan bagi kedua negara tersebut agar memperoleh pencapaian dan kesepakatan yang terbaik.

Kita melihat Indonesia adalah negara yang memiliki demokrasi presidensial serta berbagai arah pandangan dan sistem tatanan negara didasari Pancasila, sedangkan Australia menganut sistem demokrasi liberal yang mengarah kepada sistem parlementer. Indonesia menekankan untuk saling menerapkan prinsip sosial kolektif dalam bermasyarakat, sedangkan Australia memilih prinsip privat individual. Dari perbedaan terkait sudut pandang budaya dan politik antar negara tersebut, Australia melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem otoriter dan diktator meski saat ini negara tersebut menganut sistem yang demokratis. Sedangkan Indonesia melihat Australia sebagai negara yang masyarakatnya sedikit frontal terhadap pemerintahnya dengan melemparkan kritik secara umum, sehingga Indonesia mempertanyakan bagaimana kebijakan demokrasinya, mekanismenya adalah Indonesia memilih stabilitas politik negara menjadi hal yang lebih diutamakan

dibandingkan Australia yang mempermudah pers untuk memperoleh kebebasan terhadap kinerja pemerintahannya. Dua poin ini yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman krusial bagi kedua negara tersebut. Kemudian kebijakan luar negerinya, kedua negara ini juga sama-sama memiliki momen yang berbeda.

Indonesia dan Australia pada periode pertengahan masa 1960-an mengalami kerenggangan. Bukan karena konflik, melainkan kedua negara tersebut lebih fokus untuk menjalin politik luar negeri dengan negara-negara lain. Australia merupakan sebuah negara yang terpencil di bagian selatan dunia, Australia sendiri memiliki pola pikir yang melihat Indonesia ini kapan saja dapat menjadi keamanan bagi negaranya bahkan menjadi ancaman bagi negaranya. Maka semua itu tergantung bagaimana prospek Australia dalam menata kebijakan yang tepat untuk menghadapi Indonesia, akankah menjadi baik atau menjadi buruk bagi Australia. Kemudian sektor ekonomi, yang terlihat dua negara tersebut masih memiliki keraguan pada saat itu. Indonesia lebih memilih negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan Eropa. Begitu pula dengan Australia yang memilih Amerika Serikat, Singapura, Thailand, Malaysia dan negara-negara Asia Timur. Kedua negara tersebut dapat saja membangun pertumbuhan ekonomi yang berpotensi besar, namun saja berbagai perbedaan budaya dan politik membuatnya saling menimbulkan ketidakpercayaan dan keraguan (Wijayanti 2019).

Dalam membangun kembali kerjasama antara Indonesia dan Australia. Kedua negara tersebut telah melakukan penguatan hubungan dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Pada April 2018 Indonesia dan Australia telah melaksanakan Asia Pacific Rainforest Summit (APRS) di Yogyakarta, kesepakatan ini berupaya untuk

membantu penyelamatan hutan hujan di dalam kawasan Asia Pasifik (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018).

Dalam hal ini membuktikan bahwa Indonesia dan Australia pasca peristiwa pelatihan militer bersama yang terjadi pada 2016 dapat berjalan dengan baik diluar dari bidang militer. Disamping itu pada 11 Oktober 2018 Indonesia dan Australia melakukan pertemuan menteri pertahanan, yaitu Menteri Pertahanan Marise Payne (Australia) dan Ryamizard Ryacudu (Indonesia). Kedua negara tersebut membahas tentang kepentingan-kepentingan kawasan Asia Pasifik, keamanan maritim dan kerjasama dalam bidang siber. Serta timbulnya upaya prakarsa regional *Our Eyes* dan Patroli Trilateral (Kedutaan Besar Australia Indonesia 2018). Konsep dari Our Eyes ini merupakan sebuah kebijakan yang telah disetujui oleh Menhan Ri dan juga telah didukung oleh Menhan ASEAN, yang mana bertujuan untuk meningkatkan sistem pertahanan, keamanan, militer serta jaringan intelijen yang terintegrasi (KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 2018).

Memasuki tahun 2019 Indonesia dan Australia meratifikasi sebuah kesepakatan diluar bidang militer dan pertahanan. Yaitu di bidang ekonomi yang bernama *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA). Kebijakan ini berupaya untuk memberikan kelancaran dan kemudahan bagi kedua negara untuk saling meningkatkan kualitas perekonomian serta kelancaran dalam perdagangan antara satu sama lain (KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM 2021). Hal ini juga tak memberikan hambatan pada Indonesia Australia pasca peristiwa penistaan Pancasila dan TNI pada tahun 2016 lalu. Pada 2019 Indonesia melakukan kerjasama pertahanan dan militer dengan Australia. Yang mana Panglima

militer Angus Campbell pergi ke Indonesia untuk menghampiri Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Dalam pertemuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas dalam pertahanan kedua negara (Abke 2019).

Pada saat kedua negara tersebut telah menyelesaikan urusan domestiknya masing-masing, kini akhirnya kebijakan IA-CEPA pun dapat diluncurkan pada 28 Februari 2020. IA-CEPA ini menjadi sebuah "Economic Powerhouse" yaitu konsep yang memperoleh keunggulan dan produktivitas antar kolaborasi kedua negara agar bisa mengiringi pasar negara lainnya. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan bahwa IA-CEPA ini diharapkan dapat membantu dalam menangani kasus COVID-19 yang tengah terjadi (KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI CANBERRA, AUSTRAALIA 2020). Dalam sektor militer dan pertahanan, Indonesia juga mendapatkan bantuan dari Australia pada tahun 2020. Yaitu berupa APD dan dukungan program mitigasi terhadap Covid-19 kepada TNI dan lingkungan Kementerian Pertahanan. Serta ikut sertanya Australia dalam mencari KRI Nanggala-402 milik Indonesia yang tenggelam (KEMENTERIAN PERTAHANAN INDONESIA 2021).

Pada tahun 2021 Menhan dan Menlu Indonesia-Australia melakukan sebuah pertemuan. Hal tersebut dalam rangka membahas dialog 2+2. Konsep dari pembahasan tersebut adalah untuk menangani akses vaksin Covid-19 agar dapat merata, pemulihan ekonomi di era pandemi, serta kerjasama dibidang ekonomi dan pertahanan. Dialog 2+2 merupakan sebuah konsep yang telah dikembangkan sejak 2011 oleh kedua negara tersebut, sebagai guna untuk membahas urusan regional,

bilateral, serta global. Kedua negara tersebut mengharapkan agar dapat terciptanya stabilitas, kemakmuran dan perdamaian dalam kawasan Asia Pasifik (Roza 2021).

2.2. Dampak normalisasi hubungan bilateral Indonesia dan Australia terhadap kerjasama militer.

Dalam kesepakatan yang diinginkan kedua belah negara tersebut adalah hubungan dalam kerjasama militer agar dapat diteruskan. Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu memberikan pernyataan bahwa dapat sah kembali hubungan kerjasama dibidang militer dapat dijalankan kembali, beliau melihat adanya Australia yang kian mengajukan permohonan maafnya terhadap negara Indonesia terkait materi pelatihan militer yang diberikan oleh militer Australia. Letnan Jenderal Angus John Campbell menghampiri Mabes TNI untuk memberikan klasifikasinya serta meminta maaf terkait permasalahan yang ada pada Februari 2017. Tak lama dari itu mulai muncul berita pers kepresidenan yang telah diterbitkan 26 Februari, yang berisikan kedua negara tersebut sepakat untuk menjalin kembali hubungan kerjasama di bidang militer yang memburuk tempo waktu (Widiastuti, 2017).

Pasca pernyataan damai antara Presiden Indonesia Jokowi dan PM Malcolm Turnbull dalam bidang militer, Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Australia Marise Payne melakukan sebuah pertemuan. Pada hari Kamis 16 Maret 2017, mereka bertemu dalam forum *Defence Minister Meeting* di *Fleet Base East Garden Island*, Sydney, Australia. Hal ini juga merupakan sebuah pertemuan regular yang diadakan kedua Menteri Pertahanan setiap tahun. Dalam

pertemuan tersebut Menteri Pertahanan Indonesia menginginkan adanya peningkatan dalam kerjasama di bidang militer dengan Australia, yaitu Operasi Pemeliharaan Perdamaian dari 2017 sampai 2020. Usai rapat tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia mengapresiasi kepada pihak Australia yang dapat menyelesaikan permasalahan pemberhentian kerjasama di bidang militer Indonesia-Australia pada tahun 2016 (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2017).

Indonesia dan Australia memiliki visi dan misi dalam bidang pertahanan, yakni Dialog 2+2 seperti yang dibahas sebelumnya. Upaya ini bertujuan untuk membangun strategi kemitraan yang komprehensif, serta wujud persahabatan dan cita-cita kedua belah negara untuk kualitas kerjasama dalam sektor pertahanan. Selanjutnya Indonesia dan Australia mulai melakukan Agenda Pasifik, yaitu merupakan sebuah pembangunan kerjasama mengenai tata kelola pemerintahan dari skala perubahan iklim sampai pengembangan masyarakat. Indonesia dan Australia tak hanya menjaga pertahanan wilayah teritorial saja, namun juga menjaga pertahanan dalam keamanan siber melalui kerjasamanya dalam mengembangkan kapasitasnya pada tahun 2018. Serta pelaksanaan kebijakan kinerja prakasa *Our Eyes* dan Patroli Trilateral yang telah dibahas sebelumnya. Indonesia dan Australia juga merupakan negara yang bermitra dalam keamanan maritim, menteri-menteri kedua negara tersebut memperkokoh komitmen untuk menangani isu dalam kemaritiman. Berbagai ide mengenai perkembangan yang mutakhir juga saling tukar-menukar oleh mereka agar dapat mencapai visi misi yang diharapkan (Kedutaan Besar Australia 2021).

Pada Februari 2019 panglima militer Australia Angus John Campbell melakukan kunjungan ke Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai guna sistem, komponen serta informasi dalam hubungan kerjasama pertahanan. Perwira Militer Australia Campbell menghampiri Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard serta Panglima TNI Hadi Tjahjanto di Jakarta, hadirnya Campbell tepat menjelang penandatanganan kerjasama pertahanan Indonesia-Australia. Pembahasan tersebut berisikan tujuan untuk meningkatkan integritas dalam pertahanan dan mencegah timbulnya ancaman dalam pertahanan kedua negara tersebut. Mayor Jenderal TNI Candra Wijaya bahwa pertemuan ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan teknis, taktis serta strategi. Kemudian pembicara Campbell bersama kepala staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa bahwasannya sepakat untuk meningkatkan kualitas kerjasama tersebut, mekanismenya mulai dari pertukaran dosen, pelatihan bersama dan kolaboratif dalam pendidikan militer antara Indonesia dan Australia (Abke 2019).

BAB 3

KEBIJAKAN UNTUK MENORMALISASI KEMBALI HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA PASCA MEMBURUKNYA HUBUNGAN KEDUA NEGARA

Memasuki Bab ke 3 penulis mulai melakukan pembahasan terhadap teori dari hasil rumusan masalah yang dibuat. Hal ini menyangkut tentang apa yang telah terjadi oleh kedua negara yang berseberangan namun beda kontinen, yaitu Indonesia dan Australia. Kedua negara ini melanjutkan hubungan kerjasamanya kembali di bidang militer pasca penistaan Pancasila dan TNI oleh Australia terhadap Indonesia pada tahun 2016 lalu.

Pada tahun 1955 Indonesia dan Australia bergerak dalam membangun hubungan dalam memperoleh pertahanan dalam bidang militernya. Berbagai upaya pun dilakukan seperti melakukan pertukaran informasi serta sistem intelijen demi kelancaran tanpa hambatan. Sepanjang perjalanan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Australia seringkali terjadi permasalahan pasang surut. Hal ini kian menjadi problematika dalam melancarkan strategi yang ingin diwujudkan, tentunya dalam kerjasama militer salah satunya, seperti contohnya Australia yang melakukan penyadapan terhadap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Australia yang menginginkan pasukannya ditempatkan di Indonesia. Hal ini di nilai oleh negara Indonesia sebagai sikap intervensi.

Maka dari itu pemerintah Indonesia ingin tetap melanjutkan dan membuka kembali hubungan kerjasama di bidang militer dengan Australia. Meskipun negara tersebut telah mendapat perlakuan yang kurang baik oleh Australia. Dari teori ini penulis memiliki sudut pandang, yaitu Indonesia tidak menjadikan permasalahan ini sebagai hambatan dalam menjalin hubungan. Masih banyak hal yang lebih penting untuk dijaga dari pondasi pertahanan kedua negara tersebut. Karena pasca Indonesia yang menunjukkan reaksinya terhadap tindak Australia, segenap aparatur dari Australia mulai memberikan klarifikasi dan pernyataan maaf terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia pun bersikap rasional terhadap apa yang telah terjadi, sehingga terjalinnya kembali hubungan militer tersebut pada tahun 2017.

Graham T. Allison dalam karyanya membuat tiga kategori mengenai proses kebijakan luar negeri, salah satunya adalah "*Rational Actor Model*" atau Model Aktor Rasional. Penulis telah melakukan pencarian bahwa teori ini yang akan menjadi bahan pembahasan di Bab III ini. Model Aktor Rasional adalah model yang melihat sifat aktor yang memiliki tujuan pada saat menghadapi permasalahan dalam suatu kebijakan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang terbaik dalam mengambil keputusan dengan langkah-langkah alternatif yang tersedia dalam kesiapan dari pembuat kebijakan (pemerintah/negara). Allison mengatakan, bahwa Pemerintah merupakan aktor utama dalam sebuah kebijakan, kemudian upaya pemerintah ini adalah untuk mengambil suatu langkah yang memiliki nilai atau potensi tertinggi untuk meraih tujuan dari kebijakannya. Namun hal tersebut tentunya melalui tahapan atau proses pemeriksaan dan evaluasi yang mendalam.

Indonesia telah memilih langkah untuk melanjutkan hubungan dengan Australia yang tentunya diiringi oleh pilihan untung dan rugi yang akan mendatang. Keamanan dan kepentingan nasional Indonesia dipertaruhkan untuk dapat tetap berdiri menghadapi konsekuensi yang ada. Dalam teori ini terdapat 4 visual parameter yang dilalui, yaitu:

- *Goals and Objectives*: Langkah dan tujuan dari pembuat kebijakan dalam menghadapi permasalahan.
- *Alternatives*: Langkah alternatif untuk menghadapi permasalahan atau untuk mengurangi resiko yang ada dalam sebuah kebijakan.
- *Consequences*: Pembuat kebijakan akan memperhitungkan dampak dan akibat dalam menghindari konsekuensi yang berskala besar dalam suatu kebijakan.
- *Choices*: Pembuat kebijakan melakukan sebuah analisis agar dapat mendapatkan pilihan yang terbaik agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka dari itu penulis akan menjabarkan pembahasan dari Bab III ini menjadi 4 sub Bab bahasan dari apa yang telah dijelaskan oleh Allison (Allison 1971). Dalam penelitian ini salah satu parameter yang peneliti gunakan yaitu *Goals and Objectives*. Dimana *Goals* yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi, sebagai salah satu *Rational Actor Model* dalam penelitian ini, adalah menormalisasikan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Akan tetapi, hal ini bukan menjadi *Goals* utama Presiden Jokowi. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan lain yang ingin dicapai seperti membuka kembali peluang kerjasama dalam sektor perdagangan, isu kontra terorisme dan isu pertahanan.

3.1. Kebijakan Indonesia dalam Kerjasama Militer Indonesia Australia Melalui Parameter *Goals and Objectives*

Pada tahapan ini *Goals and Objectives* adalah sebuah langkah bagi aktor untuk menentukan tujuan dan target dalam menjalankan kebijakannya, sehingga aktor dapat melakukan aksinya untuk menyelesaikan permasalahannya. Allison memberikan gambaran, bahwa suatu aktor perlu untuk menakar setiap konsekuensi, kegunaan, dan rintangan apa saja yang dapat diambil dalam setiap keputusan atau tujuan dari sang pembuat kebijakan. Keuntungan, preferensi dan kegunaan adalah hal-hal yang menjadi poin penting bagi pembuat kebijakan. Hal ini berguna untuk mengambil sebuah langkah yang efektif dalam meraih tujuan yang diharapkan. Dalam pembuatan opsi yang dijadikan strategi kebijakan tersebut dapat diukur bagaimana skala keuntungan dan kerugian apa saja bila mengambil keputusan tersebut (Allison 1971, 29). Dalam parameter ini peneliti menjelaskan bagaimana Indonesia dan Australia memperoleh normalisasi dengan Goals and Objectives, hal ini merupakan salah satu dari kepentingan bersama yang dimiliki oleh kedua negara.

Dalam aksi kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Jokowi, beliau menginginkan untuk terciptanya hubungan bilateral yang baik dengan Australia dalam bidang militer. Maka dari itu, hadirnya beliau di Australia yang menghampiri PM Turnbull adalah untuk menciptakan kunjungan yang baik dan terciptanya kedamaian antara dua negara tersebut.

Global Fire Power (GFP) telah mencatat bahwasannya Indonesia memiliki kekuatan militer pada peringkat 16 dari 140 negara, serta hal ini membuat Indonesia juga merupakan negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara. Dalam segi

luas wilayah, Indonesia memiliki besaran wilayah yang menguntungkan. Indonesia memiliki sumber daya manusia TNI RI yang cukup signifikan untuk menjaga setiap daerahnya. Bahkan juga Indonesia mumpuni dari segi pengelolaan sumber daya alam, keuangan, logistik dan geografis. Berbagai faktor terkait hal yang mendongkrak keberhasilan militer Indonesia mencapai angka tersebut di antaranya:

- Indonesia memiliki total 800 ribu anggota militer, 400 ribu di antaranya adalah anggota yang aktif serta sisanya adalah anggota cadangan.
- Militer Angkatan Darat Indonesia memiliki perlengkapan persenjataan yang memadai, yakni 331 unit tank, 153 artileri swagerak, 366 artileri gerak, 1.430 unit kendaraan lapis baja dan 63 peluncur roket.
- Militer Angkatan Laut Indonesia menempati peringkat nomor 10 pada 2021. Angkatan Laut Indonesia memiliki 282 total unit kapal, yakni 179 kapal patroli, 10 kapal penyapu ranjau, 7 kapal Fregat, 24 kapal Korvet dan 5 kapal selam.
- Militer Angkatan Udara Indonesia memiliki 458 aset perlengkapan senjata dan tempur. Yakni 41 pesawat tempur, 109 pesawat latihan, 64 pesawat angkut, 38 pesawat Air Force, 17 pesawat intai dan misi khusus, 1 pesawat tank, 188 helikopter dan 15 helikopter tempur.

Dengan adanya data-data di atas membuat Indonesia sebagai negara yang terpandang oleh dunia akan kekuatan pertahanan militernya. Maka dari itu penulis memiliki sudut pandang, bahwa Australia sebagai negara terdekatnya memiliki ketertarikan untuk ikut serta dalam membentuk hubungan kerjasama bilateral dalam bidang militer. Dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang militer

membuat negara tersebut dengan sangat baik dalam menjalankan hubungan kerjasama militer, karena Australia merupakan negara *Five Power Defence Arrangement* (FPDA). FPDA ini merupakan tatanan pertahanan suatu negara gabungan persemakmuran Inggris. Australia dalam hal ini mendapatkan dukungan dan supply dari FPDA.

Namun terdapat pula tantangan investasi yang dihadapi oleh pebisnis Australia, di antaranya: Yang pertama terkait lisensi ekspor teknologi pertahanan serta *dual-use technology*. Jika *Original Equipment Manufacturer (OEM)* asing melakukan investasi di Indonesia pastinya memerlukan lisensi dari negara asalnya agar dapat melakukan proses ekspor ke Indonesia. Hal ini berguna untuk kepentingan produksi senjata, yang kedua Indonesia masih memiliki resiko yang tinggi dalam hal kemampuan teknologi serta perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan dan Intelektual (HAKI). Oleh karena itu, OEM asing harus membantu untuk mengeluarkan sumber pengetahuannya dalam membantu kemampuan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga standar yang dimiliki oleh teknologi Indonesia dapat mengiringi dengan negara asing. Kemudian soal HAKI juga Indonesia perlu untuk menghadapi tantangan dalam keamanannya. Yang ketiga soal anggaran pertahanan, Indonesia ternilai masih memiliki jumlah persediaan senjata yang terbilang kecil. Dari APBN modal belanja yang keluar sebanyak 20 triliun rupiah atau sekitar 27% dari jumlah total anggaran pertahanan. Kemudian Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Indonesia memiliki nilai yang fluktuatif dalam waktu setiap 5 tahunnya, dari 2015-2019 berjumlah 15 triliun rupiah, kemudian 2020-2024 akan berkisar sebesar 41 triliun rupiah. Tak lupa Pinjaman Luar Negeri (PLN) juga

mengalami hal yang sama, yakni dari 2015-2019 sebesar 7,74 miliar USD, kemudian 2020-2024 berkisar sebesar 20,75 miliar USD. Yang keempat soal rezim pajak negara Indonesia. Agar negara Indonesia dapat menjadi sasaran bagi *Foreign District Investment* (FDI) dalam sektor pertahanan, Indonesia perlu memberikan angka yang dapat mengiringi negara luar terkait rezim pajak. Pemerintah seharusnya menawarkan status kawasan industri, sehingga investor dapat berorientasi pada ekspor. serta pemerintah perlu untuk menawarkan *tax holiday* kepada investasi asing. Yang kelima dampak dari adanya finansial investasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan melalui pendapatan dari penjualan senjata. Kemudian Indonesia dapat mendorong investasi di pasar domestik dan juga pasar regional (Ali 2022).

Pada Februari 2017 Indonesia dan Australia sepakat dan ingin memulihkan kerjasama militer antara kedua negara tersebut pasca permasalahan yang ada, Presiden Jokowi melakukan kunjungan pejabat tinggi ke Sydney menghampiri Perdana Menteri Malcolm Turnbull untuk membahas hal tersebut. Indonesia dan Australia benar-benar ingin membalikkan keadaan dan mulai berdamai dengan permasalahan yang telah dialami oleh militer Indonesia dari militer Australia karena suatu permasalahan yang muncul saat melakukan latihan militer bersama di Perth, Australia Barat. Malcolm Turnbull mengatakan bahwa Indonesia dan Australia saling memiliki kesamaan yang cukup banyak memberikan keuntungan demi menjaga keamanan dan stabilitas dalam kawasan, sehingga ingin menciptakan komitmen dalam menjaga hubungan bilateral tersebut. Tak hanya itu saja Presiden Jokowi dan PM Malcolm Turnbull juga membahas hal lain diluar permasalah tersebut, seperti isu perdagangan, isu kontra terorisme dan isu pertahanan. Hal ini bertujuan untuk

membangun hubungan bilateral yang lebih efektif. Hal ini bermulai sejak Indonesia yang mengulur berbagai kebijakan terkait kerjasama militernya dengan Australia pada 2017 yang lalu, militer Indonesia mengeluhkan soal poster yang dibuat oleh pasukan khusus militer Australia *Special Air Service Regiment* (SAS) dikeluhkan oleh seorang perwira militer Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara juga saling menyampaikan bahwa kedua negara memiliki demokrasi yang perlu ditegakkan untuk saling menghormati keragaman. kemudian kedua negara juga berkomitmen untuk menegakkan demokrasi, kebebasan, dan supremasi hukum dalam tatanan internasional (Australia Plus ABC 2017).

Malcolm Turnbull memberitahukan bahwa Australia akan membuka konsulat terbesar kedua terbesar di Indonesia. Dalam membahas isu perdagangan kedua negara tersebut telah menyepakati bahwa tarif impor gula akan diturunkan dari negara Australia sehingga mencapai 5% dan sejajar dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. penurunan tarif impor gula ini telah menyebabkan perusahaan gula terbesar kedua di Australia mengalami kesulitan akibat utang negara yang lebih dari 200 juta USD. Kemudian Australia akan mengurangi hambatan untuk impor dalam kategori produk Pestisida dan Kimia yang didapatkan dari Indonesia. Saat ini, arus perdagangan antara Indonesia dan Australia sebesar 15 miliar USD. akan tetapi Indonesia tidak masuk kedalam jajaran 10 besar mitra dagang bagi Australia, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan baik dan memiliki kedekatan jarak secara geografis dengan Australia. Dalam hal ini kesepakatan yang terjadi antara Indonesia dan Australia akan mengalami tantangan dan peluang dari sektor perdagangan yang terbangun dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan

Australia saat ini (Australia Plus ABC 2017). *Goals and Objectives* merupakan langkah dan tujuan dari pembuat kebijakan dalam menghadapi permasalahan. Dengan demikian, terlihat adanya ketertarikan satu sama lain dengan potensi yang dimiliki masing-masing negara untuk menjalin hubungan kerjasama dalam sektor pertahanan, keamanan dan ekonomi negara.

3.2. Parameter Alternatif dalam Normalisasi Kerjasama Militer Indonesia dan Australia (*Alternatives*)

Pada bagian ini, Allison mendeskripsikan bahwa suatu negara perlu mengambil aksi atau langkah preventif, hal ini berguna bagi sang pembuat kebijakan agar dapat memperoleh jalur alternatif bila mendapatkan suatu permasalahan yang menghambat alur suatu kebijakan yang dituju (Allison 1971, 29-30). Kebijakan alternatif perlu memiliki strategi yang spesifik, dari sekian kemungkinan namun tentunya sang pembuat kebijakan perlu menemukan satu upaya untuk menciptakan *turning point* yang mendekati dengan tujuannya. Dalam *Alternatives* ini akan diperlihatkan bagaimana Indonesia bergerak mengambil langkah alternatif untuk menarik Australia dalam meluruskan permasalahan yang ada. Seperti turunnya petinggi militer Australia untuk menangani pihak pengajar yang membuat materi pelatihan yang berisikan penistaan terhadap TNI dan Pancasila, serta menyampaikan klarifikasi terhadap apa yang telah terjadi dan meminta maaf kepada Indonesia. Sehingga normalisasi agar dapat diupayakan.

Dalam permasalahan antara militer Indonesia dan Australia terkait pelecehan Pancasila dan TNI, Wakil Komisi 1 DPR Meutya Hafid menginginkan agar dua

menteri pertahanan negara agar segera bertemu. Meutya menginginkan agar permasalahan tersebut agar diakhiri, dan mengingat negara ini adalah negara yang memiliki jarak dekat atau bertetangga segera melakukan penormalisasian hubungan Indonesia dan Australia pasca permasalahan ini. Australia yang telah menyatakan permintaan maaf oleh Indonesia telah ternilai sebagai tindakan normalisasi kembali. Namun hal itu tak memberi kemungkinan bahwa akan pulih sepenuhnya, untuk seterusnya diperlukan solusi serta komitmen dalam bentuk berbagai kebijakan yang untuk mempererat hubungannya kembali. Maka dari itu permasalah yang terjadi pada tahun 2016 tidak menjadi tanggungan yang dipikul oleh Indonesia (Sihaloho 2017).

Atas terjadinya kasus pelecehan tersebut, kerjasama antara Indonesia dan Australia akan ditangguhkan. terutama dalam bidang pendidikan dan pelatihan militer antar kedua negara. Hal tersebut akan berlangsung selama penyelidikan atau investigasi terhadap kasus peristiwa yang terjadi membuahkan sebuah hasil. Kebijakan ini disebutkan oleh Menlu RI Retno Marsudi usai melakukan rapat bersama Komisi 1 DPR, Panglima TNI, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dan Menteri Pertahanan di Gedung Nusantara II DPR. Tindakan penangguhan ini berupaya untuk memperlihatkan aksi apakah Australia akan memberikan respon terhadap Indonesia. Selanjutnya Presiden Jokowi bersama Menlu RI membahas bahwa hal ini tak menjadi hambatan bagi Indonesia dan Australia dalam berdiplomasi. (ANTARA GORONTALO 2017).

Dengan kebijakan permintaan maaf yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia, hal itu dilakukan oleh Panglima militer Australia Angus Campbell kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan

Darat Jenderal Mulyono. Campbell telah menyatakan investigasi atas tindakan yang terjadi Atas tindakan yang terjadi Australia bertanggungjawab, dengan memberikan sanksi terhadap pihak militer yang terlibat karena membuat materi terkait pelecehan yang menghina Pancasila dan TNI. Selanjutnya kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di Australia akan ditahan untuk sementara, mereka akan fokus untuk melakukan pembenahan terhadap pihak-pihak staf pengajar yang menimbulkan permasalahan ini. Maka dari itu materi-materi yang melecehkan tersebut akan direvisi. Panglima TNI dan jajarannya menerima permohonan maaf yang dilakukan oleh Australia, serta berterimakasih kepada Australia yang telah mengambil langkah ini secepatnya (Kuwado 2017).

Karena Indonesia menginginkan sebuah aksi dan tak hanya sekedar permintaan maaf saja dari Australia, yaitu dengan cara ADF yang melakukan investigasi terhadap pelaku yang membuat materi terhadap pelatihan militer Indonesia-Australia. Hal ini menjadi acuan bagi negara Indonesia untuk memperoleh pilihan alternatif. Namun pada saat itu Australia belum dapat memastikan tindak investigasi itu akan selesai (Jordan 2017).

Pelaku yang melakukan tindak penistaan terhadap Pancasila dan TNI tersebut adalah Komandan yang memimpin sekolah pelatihan bahasa. Australia memberikan kabar bahwa pelaku tersebut telah dikenakan tindakan yang tegas dengan diskors. Kemudian terdapat Perwira pertama Australia yang juga merupakan pelaku dari hal tersebut mendapatkan sanksi administratif. Menlu RI Ryamizard Ryacudu menginginkan bahwa kejadian ini tak terjadi lagi, sehingga hal ini menjadi perpecahan antara Indonesia dan Australia dalam berhubungan dan bekerjasama.

Kemudian Panglima TNI Gatot Nurmantyo menghentikan untuk sementara waktu antara kerjasama kedua negara (Antaranews 2017).

Dalam perjalanan alternatif untuk mencapai normalisasi, akhirnya keputusan yang muncul adalah perdamaian. Dua bulan setelah itu Presiden Jokowi melakukan kunjungan perdananya ke Australia untuk menghampiri malcolm Turnbull. Mereka berdua sepakat untuk berdamai dan tidak meneruskan permasalah tersebut. Kemudian Presiden Jokowi membicarakan seputar isu perdagangan antara kedua negara dan ingin membuka jendela yang luas agar kelancaran kedua negara dapat mencapai titik yang memajukan keinginan nasional dan bilateral. Hal ini dapat menjadi kunci alternatif bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang tidak baik itu kembali (BBC News Indonesia 2017).

Dalam menjaga wilayah perairan Asia Pasifik, pemerintah Australia memberikan sebuah program dan fasilitas yang bernama Australia Pacific Patrol Boat Program. Dengan demikian Australia memiliki sebuah persedian kapal-kapal patroli untuk negara Asia Pasifik dalam penjagaan bersama lingkungan tersebut dengan baik. penjagaan tersebut juga termasuk dalam penjagaan sumber daya alam yang ada di kawasan laut tersebut, tak hanya sebatas pertahanan dari ancaman luar saja. Negara australia juga melakukan pelatihan pertahanan bernama *Defense International Training Centre.* Australia menjadi sebagai kontributor utama dalam program ini untuk kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan ini. Beserta dengan ini Australia juga mengajak negara-negara yang diajak kerjasama untuk mengadakan latihan militer bersama untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih baik (Patricia Gracia Amin Nino, 2020)

Kemudian Indonesia dan Australia dalam pelaksanaan kerjasama bilateral dalam bidang pertahanan militernya membahas dialog 2+2. kebijakan ini merupakan sebuah aksi yang didasari atas rasa solidaritas oleh kedua negara untuk semakin erat dalam menjaga kawasan Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr berpendapat bahwa kebijakan ini kedepannya juga akan membahas mengenai seputar kebijakan luar negeri, isu-isu yang dihadapi bersama, serta pertahanan di tingkat regional, bilateral dan global. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia telah dipertegas dalam komitmen untuk saling menghormati kedaulatan, persatuan, kemandirian, serta integritas kewilayahan dari kedua negara tersebut. Dialog 2+2 ini selanjutnya juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi, politik, sosial dan pastinya pertahanan militer (VIVAnews 2012).

Dari hasil untuk Parameter ini, telah ditarik kesimpulan bahwasannya Indonesia menarik Australia untuk memberikan pernyataan klarifikasi terhadap Indonesia. Dari sudut pandang penulis, Indonesia bersikap rasional untuk memperoleh potensi-potensi yang dimiliki oleh Australia. Permintaan maaf dan klarifikasi yang disampaikan oleh Australia diterima oleh Indonesia, Demikian Australia juga melihat potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Hasilnya kebijakan kerjasama bilateral pun terjadi untuk saling membantu perkembangan dalam kawasan Asia Pasifik. *Alternatives* adalah langkah alternatif untuk menghadapi permasalahan atau untuk mengurangi resiko yang ada dalam sebuah kebijakan. Dengan demikian, Indonesia mengambil langkah alternatif dengan menarik Australia untuk

menyampaikan pernyataan penyesalannya terhadap apa yang telah dilakukannya, maka dari itu hal ini menjadi rasionalitas untuk menciptakan adanya normalisasi.

3.3. Konsekuensi dalam Kebijakan Indonesia Untuk Melakukan Normalisasi (*Consequences*)

Dalam suatu kebijakan alternatif kita dapat melihat tak sepanjang jalurnya memiliki momen yang selalu baik, didepannya terdapat pula hambatan-hambatan yang ada. Hal tersebut tak menutup kemungkinan bahwa dalam kebijakan alternatif yang diambil tidak menampakkan suatu cahaya yang dapat menjadi titik suatu keberhasilan. Maka hal itu perlu sangat dipertimbangkan kembali apakah langkah tersebut memiliki konsekuensi yang harus siap untuk dihadapi. Berbagai asumsi yang berdatangan akan menimbulkan perdebatan, apakah hal ini akan menjadi langkah yang akurat atau tidak bagi sang pembuat kebijakan dalam menghadapi aksi rasionalnya. Sang pembuat kebijakan dapat berhadapan dengan bagaimana mereka mengendalikan penggunaan biaya serta memperoleh manfaat suatu kebijakan tersebut (Allison 1971, 33).

Dalam bidang pertahanan dan militer, Indonesia dan Australia adalah negara yang memiliki sistem militer yang baik. Indonesia adalah negara yang memiliki sistem militer terbaik di Asia Tenggara, maka dari itu apabila kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia digabungkan dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Australia maka akan menjadi satu kesatuan yang memberikan sinergi yang dapat mempengaruhi internasional. Indonesia dan Australia membuat sebuah wadah dalam bidang militer, yang bernama Indonesia-Australia *Defence Cooperation Program*.

Program latihan tersebut melibatkan TNI dan ADF yang terdiri dari perwira masing-masing negara.

Dalam permasalahan militer yang diterima kedua negara pada tahun 2016 sempat menimbulkan perpecahan. Yang mana Australia memberikan materi pelatihan militer yang berisikan pelecehan terhadap lambang negara Indonesia dan garda terdepan dalam pertahanan negara Indonesia, yaitu Pancasila dan TNI. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi kebijakan lainnya, tak hanya di bidang militer dan pertahanan saja. Apabila hal ini terus dibiarkan dan berlanjut, negara Indonesia dan Australia tidak akan memperoleh kerjasama-kerjasama yang telah berjalan hingga sejauh ini. Contohnya kerjasama perdagangan dan investasi IA-CEPA yang telah dibahas sebelumnya, Kerjasama tersebut telah menghantarkan kedua negara tersebut menuju perekonomian yang lebih baik. Keduanya saling diuntungkan untuk memperoleh value yang baik. Maka dari itu aktor telah melakukan kebijakan yang berupaya untuk menghindari konsekuensi yang menghambat pertumbuhan negara, serta berguna demi keinginan regional, bilateral dan internasional.

Dalam Poros Maritim Dunia yang baru dicanangkan oleh Presiden jokowi memiliki pengaruh yang baik dengan negara Australia, terutama untuk program keamanan maritim. Hal ini berguna untuk membangun budaya maritim negara, dapat menjaga sumber daya yang ada dalam lautan, menciptakan konektivitas dan infrastruktur, membangun tatanan pertahanan maritim dan juga diplomasinya. Dalam kebijakan ini memiliki tantangan seperti Angkatan Laut yang membagi kapasitasnya dan harus memiliki kesiapan untuk mengontrol, mengawasi dan melindungi sektor

maritim. Poros Maritim Dunia memerlukan sistem dan tatanan yang sangat baik untuk menjaga terus bagaimana agar instrumen-instrumen yang ada harus terus memberikan yang terbaik. Indonesia adalah negara yang memiliki kawasan geografis yang cukup luas, memerlukan sumber instrumen dan sinergi yang dapat menjaga kawasan tersebut lebih baik. Dengan hal ini negara Indonesia melibatkan negaranya demi kepentingan nasional ke dalam kancah internasional, hal ini demi mendukung bagaimana sistem dalam doktrin maritim. Dengan adanya Lombok *Treaty* yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada 2006, program PMD dapat lebih terjalin dengan sangat baik. Selain dari hal itu dapat guna untuk membangun hubungan yang baik bagi keduanya. wilayah teritorial kawasan tersebut dapat terlindungi stabilitasnya. Maka dari itu kebijakan kerjasama ini menjadi jawaban bagi Indonesia untuk memberikan power yang lebih baik bagi PMD, sehingga dapat meminimalisir kurangnya sumber dukungan untuk menjaga luasnya kawasan tersebut (Pramitha 2017).

Aparat pertahanan negara Indonesia menyadari akan sebuah bentuk program pembaharuan dalam kerjasama militer dengan Australia. Dalam poin ini Indonesia berupaya untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Australia, selanjutnya Indonesia memberikan respon berupaya suplai militer yang mumpuni untuk mendukung hal tersebut. Program pembaruan tersebut pada tahun 2020 memberikan model yang baik bagi mereka. Namun militer Indonesia juga tak lupa bahwa negaranya mengalami hambatan modernisasi senjata dan teknologi militernya. Hal ini dikarenakan hambatan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Tentunya Indonesia akan tersaingi oleh investasi yang dimiliki

oleh Australia karena momen ini. Australia pada kekuatan ekonomi pertahanannya lebih unggul daripada Indonesia. pada tahun 2020-2021 Australia memiliki anggaran pertahanan sebesar 42,2 miliar USD sedangkan negara Indonesia 2020-2021 memiliki anggaran pertahanan sebesar 9,26 miliar USD, kemudian hal itu juga mendapatkan potongan sebesar 590 juta USD .

Indonesia telah lama melihat Australia memiliki potensi sebagai negara yang mampu membantu pengembangan keterampilan dan peluang pendidikan bagi militer Indonesia di luar negeri. Namun, pada fokus pembaharuan mengenai "penguatan keterlibatan internasional" yang memungkinkan terjadinya keterlibatan latihan bersama, pertukaran informasi, peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi intelijen. ketika militer Indonesia dilibatkan dalam penerimaan manfaat atas postur pertahanan Australia yang lebih asertif, sehingga para diplomat di kementerian luar negeri Indonesia memiliki probabilitas yang akan menimbulkan hambatan untuk meningkatkan persaingan yang strategis. Serta potensinya lebih jauh hingga melewati ASEAN sebagai arbiter dalam tatanan regional (INDONESIA DEFENSE MAGAZINE 2020). Consequences adalah upaya pembuat kebijakan melakukan sebuah analisis agar dapat mendapatkan pilihan yang terbaik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, program kerjasama kedua negara mengalami pembaruan, hal itu menimbulkan hambatan bagi Indonesia terkait modernisasi senjata dan teknologinya.

3.4. Pilihan Kebijakan dalam Mencapai Tujuan Normalisasi Kerjasama Militer Indonesia dan Australia (*Choices*)

Parameter yang terakhir adalah *choices*, parameter ini adalah tahapan yang membuat sang pembuat kebijakan untuk memperoleh pilihannya dalam mendapatkan satu atau lebih kemungkinan yang akan membawa harapan yang diinginkan. Sang pembuat kebijakan harus melakukan analisis terlebih dahulu agar bisa mendalami apa saja konsekuensi dalam suatu kemungkinan tersebut, apakah strategi yang dipilih memiliki *value* yang sangat baik atau malah sebaliknya. Maka dari itu harus menciptakan suatu prediksi yang akurat agar kebijakan yang berjalan memberikan keuntungan yang mensejahterakan keamanan masyarakat maupun negara (Allison 1971, 30). Dalam kesempatan ini Choices yang diperoleh oleh Indonesia adalah untuk melanjutkan hubungan kedua negara. Agar dapat memperoleh sinergi dan efektivitas dalam mengembangkan dan menjaga urusan regional, bilateral dan internasional.

Pada September dan Oktober 2021 Indonesia dan Australia melakukan sejumlah agenda kerjasama pelatihan bersama demi memperkuat kembali hubungan antara kedua negara. Termasuk diantaranya dialog 2+2 yang melibatkan menteri luar negeri dan menteri pertahanan kedua negara. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa membahas dalam kerjasama tersebut ingin meningkatkan kualitas dan kompleksitas terkait pelatihan militer bersama yang diadakan kedua negara tersebut. Demi interoperabilitas kedua negara, pelatihan Instruktur Tempur Perwira Muda *Junior Officer Combat Instructor Training* (JOCIT) di Bandung, Indonesia telah menciptakan prospek yang cukup baik untuk kelangsungan

peningkatan hubungan antara kedua negara. pelatihan tersebut telah menurunkan 165 anggota Angkatan Darat dan berjalan selama 2 minggu pada 24 September. Agenda tersebut berjalan untuk melawan masa-masa pandemi Covid-19 agar kunjungan dan pelatihan militer terus berjalan (Berty 2021).

Dalam latihan militer yang dilakukan oleh kedua negara, Dankodiklatad, Letjen TNI AM. Putranto ,S.Sos. memiliki sudut pandang yang melihat bahwa pelatihan militer bersama JOCIT memiliki efektivitas dalam peningkatan hubungan. Dengan adanya TNI AD bersama JOCIT memiliki kesiapan dan telah terdidik. JOCIT memiliki kemampuan yang profesional dalam membantu TNI AD, sehingga para militer Indonesia nantinya memiliki bekal yang baik dalam bertempur menghadapi ancaman yang tiba pada saat tertentu kedepannya. Dalam pelaksanaan peningkatan hubungan tersebut Dankodiklatad berkesempatan untuk mencoba beberapa fasilitas yang dimiliki militer Australia, seperti kendaraan taktis *Protected Mobility Vehicle* (PMV) Bushmaster dan Australian Army G Wagon bersamaan dengan Komandan Divisi 1 Australia Jake Ellwood pada daerah pelatihan CTC. Danpussenif dan Danpusdikif Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso dan Danpusdikif Kolonel Inf Khairul Anwar M. memiliki kesempatan untuk melihat teknik demonstrasi menembak 2nd *Battalion* RAR di Markas 3rd Brigade Australian *Army* (tni.mil.id 2019).

Angkatan Laut Indonesia mendapatkan masalah berupa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 di laut utara, Bali. mengetahui hal tersebut Australia memberikan bantuannya dalam progres pencarian kapal selam tersebut dan berupaya menyelamatkan kru awak kapal yang ada di dalam kapal selam tersebut pada 2021.

Komandan satgas gabungan 635 Laksamana Muda Mark Hammond bersama AFD akan berdiri bersama Angkatan Laut Indonesia atas hal ini. Hammond mulai meluaskan wilayah pencarian kapal selam tersebut demi mempermudah proses pencariannya. Komunikasi antara mereka mengalami hambatan dan telah diketahui berjarak 100 kilometer dari pantai utara Bali. ADF akan memberikan dukungan sepenuhnya apakah merekaa daat menemukan Angkatan Laut Indonesia (militaryleak.com 2021).

Pada Januari 2020 Australia dilanda sebuah kebakaran hutan. Kebakaran hutan tersebut telah melahap 27 hektar lahan tanah di hutan tersebut. Mengetahui hal tersebut Indonesia turun tangan untuk membantu permasalahan tersebut pada bulan Februari. Menlu Indonesia Retno Marsudi membuka sebuah konfirmasi bahwa negara akan membantu proses pemulihan bencana yang dialami oleh negara Australia. DPR RI memberikan perintah agar TNI menjadi relawan, anggota TNI yang pergi ke Australia sejumlah 40 anggota lebih. Yang mana terdiri dari 26 prajurit infanteri, 6 pelaut angkatan laut, 4 prajurit angkatan udara, 6 perwira perizinan, 2 personel penanggulangan bencana, 2 personel tim kesehatan, 1 anggota Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), serta sisanya 3 perwira lainnya. Sebagian besar dari mereka banyak yang ditugaskan di Blue Mountain, New South Wales, tim kebakaran lokal paling banyak membutuhkan bantuan pada kawasan tersebut untuk mengatasi kebakaran hutan yang akan dipadamkan. Dengan demikian Australia dan Indonesia bersama-sama memerangi permasalahan yang sama (Slatter 2020).

Demi meningkatkan kembali hubungan kerjasama antar kedua negara, Panglima militer Australia Angus John Campbell menemui Panglima TNI Hadi Tjahjanto di Cilangkap, Jakarta Timur, Indonesia pada 2021. Sebelumnya pertemuan ini pernah diadakan sebelumnya dan menjadi pertemuan kedua kalinya pada 2019 lalu. Pertemuan sebelumnya membahas tentang peningkatan hubungan kerjasama antara TNI dengan ADF. Pada awal pertemuan tersebut tahun 2021, pertemuan tersebut dimulai dengan pengheningan cipta atas kehilangannya kru awak kapal KRI Nanggala-402 di Museum Bhakti TNI. Untuk permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di Australia, Campbell memberikan apresiasi dengan berterimakasih kepada TNI dan BNPB. Kemudian Panglima Hadi memberikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kembali kepada Campbell atas bantuan dalam pencarian KRI Nanggala-402 yang tenggelam dengan mengirimkan anggota ADF ke perairan utara Bali, Indonesia. Panglima Hadi memberikan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Panglima Campbell atas kesempatan yang telah terjadi, selanjutnya Duta besar Australia Penny Williams memberikan penghargaan berupa gelar kehormatan kepada Panglima Hadi pada 26 Oktober. Dengan demikian diharapkan dalam hal ini Indonesia dan Australia dapat mempererat hubungannya dengan segala kebijakan yang telah berjalan (CNN Indonesia 2021).

Alasan beberapa tindakan itu menjadi pilihan untuk Indonesia menormalisasikan hubungan bilateralnya dengan Australia pasca penistaan Pancasila dan TNI yang telah terjadi. beberapa diantaranya telah membuka jendela menuju hubungan militer dan pertahanan yang semakin membaik. Setelah kasus 2016 lalu belum ditemukannya berbagai peristiwa yang membuat hubungan antara Indonesia

dan Australia yang pasang surut. Seluruh kebijakan yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik bagi kedua negara tersebut. Hal ini menjadi faktor pendukung bagi parameter *Choices* dalam Model Aktor Rasional. Choices adalah upaya pembuat kebijakan melakukan sebuah analisis agar dapat mendapatkan pilihan yang terbaik agar mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, Dengan segala upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Australia, berhasil menunjukkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah dinormalisasikan kembali. Terutama dalam sektor pertahanan negara.

Tabel 2: Hasil dari Parameter *Rational Actor Model*

	Parameter	Hasil Parameter
RATIONAL ACTOR MODEL	*Goals and Objectives*	Terlihat adanya ketertarikan satu sama lain dengan potensi yang dimiliki masing-masing negara untuk menjalin hubungan kerjasama dalam sektor pertahanan, keamanan dan ekonomi negara.
	Alternatives	Indonesia mengambil langkah alternatif dengan menarik Australia untuk menyampaikan pernyataan penyesalannya terhadap apa yang telah dilakukannya, maka dari itu hal ini menjadi rasionalitas untuk menciptakan adanya normalisasi.
	Consequences	Program kerjasama kedua negara mengalami pembaruan, hal itu menimbulkan hambatan bagi Indonesia terkait modernisasi senjata dan teknologinya.
	Choices	Dengan segala upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Australia, berhasil menunjukkan bahwa hubungan bilateral kedua negara telah dinormalisasikan kembali. Terutama dalam sektor pertahanan negara.

Sumber: Analisis Peneliti melalui Landasan Teori

Dalam penelitian ini, peneliti meletakkan argumen bahwa hubungan bilateral antar Indonesia dan Australia telah dinormalisasikan secara efektif melalui 4 Parameter yang telah diangkat. Hal tersebut telah terlihat dari *Goals and Objectives* yang berkeinginan Indonesia yang berkeinginan untuk memperoleh pembangunan sinergi demi pembangunan dan perkembangan kedua negara. *Alternatives* diperoleh oleh kedua negara dengan melalui permintaan maaf yang dilakukan oleh Australia. Serta kunjungan Presiden Indonesia dalam membuka dialog normalisasi kedua negara. Consequences membahas mengenai apabila kedua negara tidak melakukan normalisasi kembali maka Indonesia akan mengalami hambatan terkait modernisasi terkait perkembangan senjata dan teknologinya. *Choices* memaparkan bahwa keputusan yang dilakukan oleh kedua negara untuk menormalisasikan kembali hubungan bilateral telah memberikan dampak yang efektif bagi kedua negara dalam sektor kerjasama dalam berbagai bidang, terutama dibidang pertahanan dan militer

PENUTUP (BAB 4)

4.1. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah diteliti, kasus penistaan terhadap Pancasila dan TNI sempat memberikan tegangan terhadap kedua hubungan negara. Hal ini terjadi pada tahun 2016 di Perth, Australia. Awalnya bermula ketika Indonesia melakukan pelatihan militer bersama di Australia. Instruktur bahasa Kopassus menemukan materi yang berisikan penistaan terhadap Pancasila dan TNI. Permasalahan ini menjadi polemik yang membuat Indonesia merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh militer Australia. Namun dengan Presiden Jokowi yang melakukan aksi rasionalnya terhadap Australia, hal ini dapat segera ditangani dan tidak menjadi permasalahan yang berlarut.

Selanjutnya disambut dengan Australia yang menyampaikan klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi, di antaranya seperti Perdana Menteri Malcolm Turnbull, Menteri Pertahanan Marise Payne, Panglima militer Angus Campbell menunjukkan sikap tanggungjawab dan rasa perdamaiannya terhadap Indonesia. Investigasi pun dilakukan untuk menelusuri sumber masalah yang telah terjadi. Kerjasama antara kedua negara sempat dihentikan untuk sementara waktu pasca hal tersebut, namun hal tersebut tidak berlangsung begitu lama.

Setelah itu Indonesia dan Australia melakukan berbagai kebijakan untuk menciptakan kondisi dimana agar kedua negara tersebut dapat membaik kembali. Seperti diantaranya kerjasama pertahanan di kawasan maritim, pertahanan militer, pelatihan militer, kerjasama perdagangan dan investasi, dan lain sebagainya.

Hubungan antara Indonesia dan Australia kian membaik dari waktu ke waktu. Tentunya hal ini karena aktor menghadapi permasalahan dengan rasionalitas dan mengesampingkan kepentingan negara, dengan demikian Indonesia dan Australia dapat melangkah kedepan menuju hubungan yang lebih baik.

Dalam konsep yang digunakan oleh peneliti, penelitian ini memberikan 4 parameter yang menjadi alasan mengapa aktor bersikap rasional atas perlakuan Australia terhadap Indonesia semasa latihan militer di Perth, Australia 2016. Sehingga hal itu mengungkapkan bagaimana lancarnya hubungan kedua negara agar dapat mencapai tujuan dan harapan yang diinginkan. Untuk langkah kedepannya Indonesia dan Australia selama 5 tahun ke belakang dapat membangun hubungan bilateral yang baik.

4.2. REKOMENDASI

Peneliti menulis penelitian yang berjudul Analisis kebijakan Indonesia untuk Menormalisasi Kembali Kerjasama Militer Indonesia-Australia 2016-2021 melalui perspektif Rational Actor Model. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah menarik suatu sudut pandang suatu aktor dalam menghadapi permasalahan. Indonesia dan Australia memiliki sinergi dalam menjalankan hubungan bilateral. Namun penelitian ini tentunya akan memiliki perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian yang baru akan mendatang. Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi batu loncatan bagi peneliti-peneliti lain dalam mengembangkan penelitiannya.

Penelitian ini menggunakan konsep Rational Actor Model, penelitian ini memfokuskan bagaimana suatu aktor menghadapi suatu permasalahan secara rasional, yang mana berguna untuk terus melangkah demi pertumbuhan dan perkembangan keinginan regional, bilateral, serta internasional. Dalam konsep ini memiliki kemungkinan untuk dapat dikembangkan, kemudian akan melahirkan sebuah sudut pandang yang bervariatif dan luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abke, Tom. 2019. "Australia dan Indonesia berupaya memperdalam kerja sama pertahanan." Indo-Pacific Defense Forum. https://ipdefenseforum.com/id/2019/03/australia-dan-indonesia-berupaya-memperdalam-kerja-sama-pertahanan/.

Ali, Alman H. 2022. "5 Tantangan Investasi Asing di Sektor Industri Pertahanan RI." CNBC Indonesia (Jakarta), July 28, 2022. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20220728132331-14-359324/5-tantangan-investasi-asing-di-sektor-industri-pertahanan-ri.

Allison, Graham T. 1971. Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis. Canada: Boston: Little.

Amin Nino, Patricia G., D.A W. Dharmiasih, and Putu Titah K. Resen. 2020. "Diplomasi Pertahanan Dan Militer Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Myanmar Di Tengah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Tahun 2018." DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/62777.

Antara Gorontalo. 2017. "Menlu: sebagian kerja sama militer Indonesia-Australia ditangguhkan." https://gorontalo.antaranews.com/berita/34107/menlu-sebagian-kerja-sama-militer-indonesia-australia-ditangguhkan?

Antaranews. 2017. "Menhan: Australia sudah Tindak Anggota Terlibat Pelecehan." ANTARA Jateng. https://jateng.antaranews.com/berita/158267/menhan-australia-sudah-tindak-anggota-terlibat-pelecehan.

Australia Plus ABC. 2017. "Indonesia Pulihkan Kerjasama Militer dengan Australia." detikNews (Jakarta), February 27, 2017. https://news.detik.com/abc-australia/d-3433085/indonesia-pulihkan-kerjasama-militer-dengan-australia.

BBC News Indonesia. 2017. "Indonesia dan Australia pulihkan hubungan militer." BBC. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39095271.

beritasatu.com. 2017. "Australia Menyesal Membuat Militer Indonesia Tersinggung." BeritaSatu.com. https://www.beritasatu.com/archive/407863/australia-menyesal-membuat-militer-indonesia-tersinggung.

Berty, Teddy Tri S. 2021. “Militer Indonesia-Australia Perkuat Hubungan Pertahanan Via Latihan Bareng hingga Kunjungan Perwira Senior.” Liputan6.com. https://www.liputan6.com/global/read/4689951/militer-indonesia-australia-perkuat-hubungan-pertahanan-via-latihan-bareng-hingga-kunjungan-perwira-senior.

Blaxland, John. 2021. “Imagining Sweeter Australia-Indonesia Relations.” Journal of Global Strategic Studies, (Juni), 55-76. https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/JGSS/article/view/572/237.

CNN Indonesia. 2017. “Indonesia Hentikan Sementara Kerja Sama Militer dengan Australia.” YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L8GD21Wg72g.

CNN Indonesia. 2017. “Soal Insiden Penghinaan Pancasila, Menteri Pertahanan Australia Sampaikan Maaf & Penyesalan.” YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=yZYXxiaRqik.

CNN Indonesia. 2021. “Petinggi Militer Australia Temui Panglima Hadi di Mabes TNI Cilangkap.” CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211105154917-20-717214/petinggi-militer-australia-temui-panglima-hadi-di-mabes-tni-cilangkap.

DW. 2017. “Jokowi ke Sydney, Hubungan Militer Indonesia-Australia Pulih – DW – 27.02.2017.” DW. https://www.dw.com/id/jokowi-ke-sydney-hubungan-militer-indonesia-australia-pulih/a-37729215.

Dwison, Hervan. 2017. “Status Hubungan Bilateral antara Indonesia Australia Setelah Penghinaan Ideologi Pancasila.” (September), 22-23. https://repository.unsri.ac.id/16763/1/RAMA_74201_02011181320061_0029075706_0001027402_01_front_ref.pdf.

Herrmann, Richard. 1986. “The Power of Perceptions in Foreign-Policy Decision Making: Do Views of the Soviet Union Determine the Policy Choices of American Leaders?” American Journal of Political Science. Vol. 30 No. 4 (November): 841-875.

Indonesia Defense Magazine. 2020. “Mencermati Strategi Pertahanan Australia dan Implikasinya pada Kepentingan Indonesia.” Indonesia Defense Magz. https://indonesiadefense.com/mencermati-strategi-pertahanan-australia-dan-implikasinya-pada-kepentingan-indonesia/.

Jordan, Ray. 2017. “Militer Australia Mulai Investigasi Kasus Pelecehan Pancasila.” detikNews. https://news.detik.com/berita/d-3391776/militer-australia-mulai-investigasi-kasus-pelecehan-pancasila.

Kedutaan Besar Australia Indonesia. 2016. “Dialog 2+2 Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Indonesia-Australia Keempat.” Kedutaan Besar Australia. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM16_072.html.

Kedutaan Besar Australia Indonesia. 2018. “Pertemuan Menteri Pertahanan Australia-Indonesia 2018.” Kedutaan Besar Australia. https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM18_050.html.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. 2020. “Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia Akan Berlaku Efektif.” Kemlu. https://kemlu.go.id/canberra/id/news/6650/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia-dan-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020.

Kementerian Investasi/BKPM. 2021. “IA-CEPA Pacu Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia.” Invest Indonesia. https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ia-cepa-pacu-kerja-sama-ekonomi-indonesia-dan-australia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. “Indonesia - Australia Perkuat Kerjasama Bidang LHK.” PPID. http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/4655/indonesia-australia-perkuat-kerjasama-bidang-lhk.

Kementerian Pertahanan Indonesia. 2021. “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. https://www.kemhan.go.id/2021/09/09/menhan-ri-indonesia-dan-australia-sepakat-meningkatkan-dca-menjadi-kerjasama-pertahanan-komprehensif.html.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2017. “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. https://www.kemhan.go.id/2017/03/16/pertemuan-menteri-pertahanan-ri-dengan-menhan-australia-pada-defence-ministers-meeting.html.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2018. “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.” Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

https://www.kemhan.go.id/2018/01/25/soft-launching-our-eyes-indonesia-dan-lima-negara-asean-kerja-sama-pertukaran-informasi-strategis.html.

Kompas TV. 2017. “Kemenhan Putus Kerja Sama Militer Dengan Australia.” YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wxE5pmWSdtY.

Kumparan NEWS. 2017. “Kerja Sama Militer Ditunda, Panglima TNI Tak Akan ke Australia.” kumparan.com. https://kumparan.com/kumparannews/kerja-sama-militer-ditunda-panglima-tni-tak-akan-ke-australia/1.

Kuwado, Fabian j. 2017. “Soal Pelecehan Pancasila, Militer Australia Akhirnya Minta Maaf.” Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2017/02/09/11035421/soal.pelecehan.pancasila.militer.australia.akhirnya.minta.maaf.

Latifa, Ade. 2010. “Aplikasi Model Pengambilan Keputusan Dalam Perilaku Fertilitas.” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 5, No. 1:55-73. http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/viewFile/100/91.

MilitaryLeak. 2021. “Royal Australian Navy Vessels Support Search For Missing Submarine KRI Nanggala.” MilitaryLeak. https://militaryleak.com/2021/04/24/royal-australian-navy-vessels-support-search-for-missing-submarine-kri-nanggala/.

Nino, PG A., DA W. Dharmiasih, and PT K. Resen. 2018. “Diplomasi Pertahanan Dan Militer Pemerintah Australia Dengan Pemerintah Myanmar Di Tengah Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya Tahun 2018.”)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, 1-14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/62777.

Noventri, Widya. 2014. “Peran Diplomasi Politik Luar Negeri dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 27, No. 2 (August): 122-128. http://journal.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/5522.

Pramitha, Dewi A. 2017. “Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Dalam Hubungan Comprehensive Partnership di Bidang Keamanan Maritim.” Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan Vol. 3, No. 2 (June): 18-31. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DP/article/viewFile/86/70.

Prof. Armaidy Armawi, M.Si. 2019. “Eksistensi TNI Dalam Menghadapi ancaman Militer dan Nir Militer Multidimensional di Era Milenial.” WIRA Edisi Khusus HUT TNI Ke 74, 5-11. https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2019/12/wiraedsus2019-web.pdf.

Rd., Dessy Noer P. 2017. “Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Kasus Penyadapan Pada Era Pemerintahan SBY dan Implikasinya Terhadap Kerjasama Militer Indonesia-Australia.” Skripsi(S1) Thesis, Universitas Pasundan, 2-13. https://onesearch.id/Record/IOS3183.27558.

Roza, Rizki. 2021. “Penguatan Hubungan Indonesia-Australia Untuk Kepentingan Strategis di Indo-Pasifik.” Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. 8, No. 18/2/Puslit (September): 7-12. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-18-II-P3DI-September-2021-244.pdf.

Setyawati, Siti M., and Dafri Agussalim. 2015. “Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 19, No. 2 (November): 111-124. https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10848.

Sihaloho, Markus J. 2017. “Polemik TNI-Militer Australia, DPR Dukung Kerja Sama Militer Dihentikan.” BeritaSatu.com. https://www.beritasatu.com/nasional/407767/polemik-tnimiliter-australia-dpr-dukung-kerja-sama-militer-dihentikan.

Sihaloho, Markus J. 2017. “Wakil Ketua Komisi I Sarankan Menteri Pertahanan RI-Australia Normalisasi Hubungan.” beritasatu.com. https://www.beritasatu.com/news/408107/wakil-ketua-komisi-i-sarankan-menteri-pertahanan-riaustralia-normalisasi-hubungan.

Slatter, Fahry. 2020. “Indonesian military provides assistance to Australia during the 2020 bushfires – Australia-Indonesia Youth Association.” Australia-Indonesia Youth Association. https://aiya.org.au/2020/09/14/masa-tentara-indonesia-membantu-australia-selama-kebakaran-hutan-2020/.

tempo.co. 2017. “Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia.” Dunia Tempo.co. https://dunia.tempo.co/read/832584/indonesia-hentikan-kerja-sama-militer-dengan-australia.

tempo.co. 2017. “Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia.” Dunia Tempo.co. https://dunia.tempo.co/read/832607/ini-materi-pelatihan-militer-australia-yang-hina-indonesia.

tni.mil.id. 2019. “Dankodiklatad Tinjau Latihan Jocit-A TA.” Website Tentara Nasional Indonesia. https://tni.mil.id/view-159460-dankodiklatad-tinjau-latihan-jocit-a-ta-2019.html.

VIVAnews. 2012. “Indonesia-Australia Gelar Dialog 2+2 - Internasional.” Universitas Muhammadiyah Malang. https://www.umm.ac.id/id/international/indonesia-australia-gelar-dialog-22.html.

White, Brian, and Michael Clarke, eds. 1989. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach. N.p.: E. Elgar.

Widiastuti, Rina. 2017. “Kasus Penghinaan Pancasila Militer Australia, Ini Kata Retno.” Nasional Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/833525/kasus-penghinaan-pancasila-militer-australia-ini-kata-retno.

Widiastuti, Rina. 2017. “Ryamizard: Kerja Sama Militer dengan Australia Berlanjut.” Nasional Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/851067/ryamizard-kerja-sama-militer-dengan-australia-berlanjut.

Wijayanti, Yeni. 2015. “Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Tahun 1945-1995.” Jurnal Artefak Vol. 3, No. 1:51-58. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1109.